



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017**

**Jl. Yos sudarso No. 34 Km.7 Taba Pingin
Telp. /Fax. (0733) 451131
Lubuklinggau - Sumatera Selatan
e-mail : keuangan.palubuklinggau@gmail.com**



KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Lubuklinggau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lubuklinggau, 5 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H. MUHAMMAD ZAZILI, S.Ag
NIP.197302281993031003



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan	19
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Kas Dibendahara Pengeluaran	25
C.2. Kas Dibendahara Penerimaan	26
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	26
C.4. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	27
C.5. Persediaan	27
C.6. Tanah	28
C.7. Peralatan dan Mesin	28
C.14. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.15. Uang Muka dari KPPN	33
C.16. Utang kepada Pihak Ketiga	33
C.17. Ekuitas	33
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	42
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	42
F.2. Pengungkapan Lain-lain	42

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

(Wilayah Hukum Kota Lubuklinggau Kabupaten Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara)

Jalan Yos Sudarso No.34 Lubuklinggau 31626

Telp/Fax.(0733) 451131

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 5 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

H. MUHAMMAD ZAZILI, S.Ag

NIP.197302281993031003



RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp46.673.406.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp4.361.364.189 atau mencapai 95,52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.565.940.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.149.497.409 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.517.000 Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.147.980.409 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp36.370.868 dan Rp5.149.497.409.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14.681.106, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.266.560.839 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(4.251.879.733). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.543.700 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(4.250.336.033).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp5.055.519.367 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(4.250.336.033) dikurang dengan koreksi-koreksi senilai Rp(6.747.576) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.314.690.783 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp5.113.126.541.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	46.673.406	-	13.489.860
JUMLAH PENDAPATAN		-	46.673.406	-	13.489.860
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.622.953.000	3.452.406.781	95,29	3.917.219.589
Belanja Barang	B.4	657.987.000	627.257.408	95,33	492.568.486
Belanja Modal	B.5	285.000.000	281.700.000	98,84	146.571.300
JUMLAH BELANJA		4.565.940.000	4.361.364.189	95,52	4.556.359.375



II. NERACA

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.4	-	9.067.200
Persediaan	C.5	1.517.000	424.000
Jumlah Aset Lancar		1.517.000	9.491.200
ASET TETAP			
Tanah	C.6	982.750.000	982.750.000
Peralatan dan Mesin	C.7	1.232.375.760	950.675.760
Gedung dan Bangunan	C.8	4.430.745.800	4.430.745.800
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.10	3.398.578	3.398.578
Konstruksi dalam pengerjaan	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(1.501.289.729)	(1.321.424.821)
Jumlah Aset Tetap		5.147.980.409	5.046.145.317
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.13	155.215.000	155.215.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(155.215.000)	(155.215.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		5.149.497.409	5.055.636.517
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	5.653.568	117.150
Pendapatan Diterima di Muka	C.17	30.717.300	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		36.370.868	117.150
JUMLAH KEWAJIBAN		36.370.868	117.150
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	5.113.126.541	5.055.519.367
JUMLAH EKUITAS		5.113.126.541	5.055.519.367
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.149.497.409	5.055.636.517



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	14.681.106	13.489.860
JUMLAH PENDAPATAN		14.681.106	13.489.860
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.461.473.981	3.908.152.389
Beban Persediaan	D.3	42.194.000	15.670.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	327.869.141	294.441.454
Beban Pemeliharaan	D.5	232.518.809	160.506.262
Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.640.000	21.675.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	179.864.908	177.037.387
JUMLAH BEBAN		4.266.560.839	4.577.482.992
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.251.879.733)	(4.563.993.132)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		1.275.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		268.700	(5.500)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		1.543.700	(5.500)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.250.336.033)	(4.563.998.632)
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan PNB		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.250.336.033)	(4.563.998.632)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	5.055.519.367	4.984.455.954
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.250.336.033)	(4.563.998.632)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.1	-	91.622.630
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.2	(6.747.576)	-
JUMLAH		(6.747.576)	91.622.630
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.314.690.783	4.543.439.415
EKUITAS AKHIR	E.5	5.113.126.541	5.055.519.367



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Lubuklinggau

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Lubuklinggau, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usaha terus menerus dari seluruh aparat Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB dalam kurun waktu setahun telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih profesional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010 – 2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB ataupun bersama dengan seluruh *stakeholder* yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis non praktis yang memudahkan Pengadilan tingkat pertama dalam menerjemahkan visi dan misi dalam operasional sehari-hari. Rencana strategis Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB disusun untuk kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam Wilayah hukum Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana yang diatur pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010.

Rencana strategis Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB Tahun 2017 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai proses untuk tercapainya Visi, Misi yang telah ditetapkan organisasi. Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kemampuan teknis dan administrasi aparaturnya.
3. Meningkatnya integritas dan moralitas aparaturnya.
4. Meningkatnya kualitas aparaturnya.
5. Meningkatnya fungsi pengawasan terhadap jalannya proses peradilan.
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal.
7. Meningkatkan ketertiban pelaksanaan administrasi.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan.

Dari rencana strategis dan tujuan maka Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB mempunyai sasaran hasil yang hendak dicapai dalam bentuk yang lebih jelas adalah:

1. Terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat.
2. Terwujudnya transparansi peradilan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelesaian perkara.
4. Terselenggaranya peradilan dengan cepat dan biaya ringan.
5. Terbentuknya aparaturnya yang memiliki pengetahuan teknis dan Administrasi.
6. Terbentuknya aparaturnya yang disiplin bersih dan berwibawa.
7. Terwujudnya aparaturnya yang profesional.
8. Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif.
9. Terwujudnya pembagian tugas secara profesional.
10. Terselenggaranya ketertiban administrasi kepaniteraan.
11. Terselenggaranya ketertiban administrasi kepegawaian.
12. Terselenggaranya ketertiban administrasi keuangan.
13. Terselenggaranya ketertiban administrasi umum.
14. Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik.
15. Terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Lubuklinggau* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini dikarenakan adanya penggeseran akun dari belanja modal menjadi belanja barang yaitu berupa Antivirus. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.622.953.000	3.622.953.000
Belanja Barang	652.987.000	657.987.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Belanja Modal	290.000.000	285.000.000
Jumlah Belanja	4.565.940.000	4.565.940.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan :
Rp46.673.406*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp46.673.406 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi

pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	1.275.000	-
Pendapatan dari pemanfaatan BMN		36.331.206	
Pendapatan Lain-lain	-	9.067.200	-
Jumlah	-	46.673.406	-

Realisasi Pendapatan Tahun 2017 dan 2016 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp33.183.546 atau 245,99 persen dari realisasi pendapatan PNBP pada periode yang sama TA 2016. Kenaikan PNBP ini disebabkan antara lain karena adanya Pendapatan Sewa berupa ATM BRI untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) TMT 1 April 2017 sampai dengan 1 April 2022 serta adanya penjualan BMN berupa meubelair dan sepeda motor pada Desember 2017.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	0,00
Pendapatan dari pemindahtanganan	1.275.000	-	0,00
Pendapatan dari pemanfaatan BMN	36.331.206	706.860	5039,80
Pendapatan Lain-lain	9.067.200	12.783.000	-29,07
Jumlah	46.673.406	13.489.860	245,99

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara :
Rp4.361.364.189

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Lubuklinggau per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.361.364.189 setelah dikurangi pengembalian belanja,

atau sebesar 95.52 persen dari anggaran senilai RP4.565.940.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.622.953.000	3.452.407.442	95,29
Belanja Barang	657.987.000	627.257.408	95,33
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	285.000.000	281.700.000	98,84
Total Belanja Kotor	4.565.940.000	4.361.364.850	95,52
Pengembalian		(661)	-
Jumlah	4.565.940.000	4.361.364.189	95,52

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 menunjukkan terjadi sedikit penurunan sebesar 4,28 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berkurang nya pegawai sehingga menyebabkan menurunnya realisasi belanja pegawai sedangkan pada belanja barang terjadi kenaikan dikarenakan lebih besarnya pagu anggaran pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.452.406.781	3.917.219.589	(11,87)
Belanja Barang	627.257.408	492.568.486	27,34
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	281.700.000	146.571.300	92,19
Jumlah	4.361.364.189	4.556.359.375	(4,28)

B.3. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp3.452.406.781*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Lubuklinggau TA 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp3.452.406.781 dan Rp3.917.219.589. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp194.995.186 atau 4,28 persen dari TA 2016.

Hal ini disebabkan antara lain oleh berkurangnya pegawai karena pindah.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.452.407.442	3.911.663.553	(11,74)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	9.106.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.452.407.442	3.920.769.553	(11,95)
Pengembalian Belanja Pegawai	(661)	(3.549.964)	(99,98)
Jumlah Belanja	3.452.406.781	3.917.219.589	(11,87)

B.4. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp627.257.408*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Lubuklinggau TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp627.257.408 dan Rp492.568.486 Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp134.688.922 atau 27,34 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan di tahun 2017.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	318.489.208	246.165.077	29,38
Belanja Barang Non Operasional	7.403.000	4.294.500	72,38
Belanja Jasa	53.460.659	63.998.647	(16,47)
Belanja Pemeliharaan	225.264.541	156.435.262	44,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.640.000	21.675.000	4,45
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	627.257.408	492.568.486	27,34
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	627.257.408	492.568.486	27,34

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal :
Rp281.700.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Lubuklinggau TA 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp281.700.000 dan Rp146.571.300. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 92,19 persen dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh adanya belanja modal untuk peningkatan kebutuhan fasilitas berupa laptop, komputer dll sebagai penunjang kinerja pegawai.

Perbandingan Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.700.000	126.650.000	122,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	19.921.300	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	281.700.000	146.571.300	92,19
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	281.700.000	146.571.300	92,19

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp281.700.000 mengalami kenaikan sebesar 122,42 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp126.650.000. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan fasilitas berupa laptop, komputer dll sebagai penunjang kinerja pegawai dan adanya program dari pusat yaitu Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pengolah data dan komunikasi	140.700.000	96.500.000	45,80
Peralatan dan fasilitas perkantoran	141.000.000	30.150.000	367,66
Peralatan dan mesin lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	281.700.000	126.650.000	122,42
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	281.700.000	126.650.000	122,42

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 adalah sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp19.921.300. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya belanja modal untuk gedung kantor untuk menambah nilai gedung dan bangunan kantor.

***Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2017 dan 2016***

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Gedung Kantor	-	19.921.300	-
Rumah Dinas	-	-	-
Bangunan Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	19.921.300	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	19.921.300	-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas Dibendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran: Rp
0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 dan 2016

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No.Rek 012901000455308	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan :
Rp0*

C.2. Kas Dibendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas dibendahara penerimaan meliputi saldo uang tunai dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dikarenakan semua PNPB telah disetorkan ke Kas Negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2017 dan 2016

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Uang Tunai	-	-
Saldo Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas :
Rp0*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggungjawab bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak memiliki saldo pada Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

*Belanja Dibayar
Dimuka:
Rp0*

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp9.067.200. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar dimuka pada tahun 2017 berjumlah Rp.0 dikarenakan telah lunasnya seluruh persekot gaji pegawai.

Rincian Belanja Dibayar DimukaTA 2017 dan 2016

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Persekot Gaji	-	9.067.200
Pembayaran Sewa gedung dan bangunan	-	-
Jumlah	-	9.067.200

C.5. Persediaan

*Persediaan:
Rp1.517.000*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.517.000 dan Rp424.000

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	1.517.000	424.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.517.000	424.000

Tanah : **C.6. Tanah**
Rp982.750.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Lubuklinggau per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp982.750.000 dan Rp982.750.000. Dan tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada asset tetap Tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	2010101002	598	No.7 Tahun 2000	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	157.750.000
2	2010101999	411	No.1 Tahun 2000	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	60.000.000
3	2010104001	1,790	No.8 Tahun 1988	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor	765,000,000
Jumlah						982.750.000

C.7. Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan
Mesin :**
Rp1.232.375.760

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.232.375.760 dan Rp950.675.760 Terdapat

Penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp281.700.000

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	950.675.760
Mutasi tambah:	
Pembelian	281.700.000
Hibah Barang	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2017	1.232.375.760
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(897.972.010)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	334.403.750

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian alat pengolah data senilai Rp146.300.000; dan
- Pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran senilai Rp141.000.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

C.8. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp4.430.745.800*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp4.430.745.800 dan Rp4.430.745.800. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	4.430.745.800
Mutasi tambah:	
Koreksi Saldo Awal	-
Penambahan nilai gedung	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	4.430.745.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(603.317.719)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	3.827.428.081

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.9. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp3.398.578*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.398.578 dan Rp3.398.578. Tidak terdapat transaksi yang merubah nilai Aset Tetap Lainnya.

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	3.398.578
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2017	3.398.578
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	3.398.578

C.11. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadiln Agama Lubuklinggau pada tahun 2017.

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(1.501.289.729)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp(1.501.289.729) dan Rp(1.321.424.821)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.232.375.760	897.972.010	334.403.750
2	Gedung dan Bangunan	4.430.745.800	603.317.719	3.827.428.081
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	3.398.578	0	3.398.578
Akumulasi Penyusutan		5.666.520.138	1.501.289.729	4.165.230.409

C.13. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 155.215.000

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp155.215.000 dan Rp155.215.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset Lain-lain senilai Rp155.215.000 tersebut telah dilaksanakan penjualan atas BMN tersebut dan juga telah diajukan untuk proses penghapusan ke Eselon 1 akan tetapi sampai dengan 31 Desember 2017 SK Penghapusan BMN tersebut belum terbit, sehingga masih tercatat sebagai Aset Lain-lain. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	155.215.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2017	155.215.000
Akumulasi Penyusutan	(155.215.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

C.14. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya:**
Rp(155.215.000)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(155.215.000) dan Rp(155.215.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Software	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Aset Lain-lain	155.215.000	155.215.000	-
Jumlah	155.215.000	155.215.000	-

C.15. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN :
Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.16. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga :
Rp5.653.568

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp5.653.568 dan Rp117.150. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak ketiga pada Tahun 2017 berupa pembayaran rekening air bulan Desember 2017, Rekening Listrik, Telepon dan Speedy bulan Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian untuk bulan Desember 2017 sebesar Rp5.653.568 yang akan dibayar pada Tahun 2018.

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik	4.483.704	Tagihan Listrik Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian Desember 2017
Belanja Langganan Telepon	86.094	Tagihan Telepon Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian Desember 2017
Belanja Langganan Internet / Speedy	1.048.000	Tagihan Internet bulan Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian Desember 2017
Belanja Langganan Air	35.770	Tagihan Air Desember 2017
Total	5.653.568	

C.17. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan
diterima dimuka:
Rp30.717.300

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.717.300 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari sewa tanah untuk ATM Bank Rakyat Indonesia yang kontraknya selama 5

tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Sisa Kontrak	Jumlah
PT. Bank Rakyat Indonesia	51 dari 60 bulan	30.717.300
Total		30.717.300

C.18. Ekuitas

Ekuitas:
Rp5.113.126.541

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing –masing sebesar Rp5.113.126.541 dan Rp5.055.519.367. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP:
Rp14.681.106*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp14.681.106 dan Rp13.489.860 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara bukan Pajak Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	5.613.906	706.860	-
Penerimaan Kembali Persekot	9.067.200	12.783.000	-29,07
PNBP Lainnya	-	-	-
Jumlah	14.681.106	13.489.860	8,83

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berasal dari sewa rumah dinas ketua pada bulan Januari dan Februari 2017, sewa rumah penjaga TMT 1 Juli 2017, dan sewa tanah untuk ATM BRI TMT 1 April 2017. Sedangkan penerimaan kembali Persekot gaji berupa angsuran uang muka gaji untuk 2 orang pegawai yang kemudian telah lunas pada bulan Oktober 2017.

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai:
Rp3.461.473.981*

Jumlah beban pegawai pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp3.461.473.981 dan Rp3.908.152.389. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016

AKUN	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.389.585.800	1.534.097.460
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	19.979	20.472
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	94.792.170	105.621.020
511122	Beban Tunj. Anak PNS	30.706.250	31.934.012
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33.800.000	33.800.000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.460.610.000	1.662.920.000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	166.985.882	218.826.085
511126	Beban Tunj. Beras PNS	68.436.900	74.375.340
511129	Beban Uang Makan PNS	211.727.000	229.682.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4.810.000	7.770.000
512211	Beban Lembur	-	9.106.000
Jumlah Beban Pegawai		3.461.473.981	3.908.152.389

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan:
Rp42.194.000*

Jumlah beban persediaan pada TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp42.194.000 dan Rp15.670.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	42.194.000	15.670.500	169,26
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	42.194.000	15.670.500	169,26

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban Barang dan Jasa pada 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp327.869.141 dan Rp294.441.454. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa :
Rp327.869.141

terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa salah satunya terjadi karena adanya belanja barang non operasional berupa pembelian pakaian dinas untuk pegawai non hakim dan pakaian kerja PPNPN .

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	208.562.400	175.815.387	18,63
Beban Pengiriman surat dinas pos pusat	1.519.240	1.393.690	9,01
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.200.000	48.960.000	(7,68)
Beban Barang Operasional Lainnya	17.900.000	0	-
Beban Bahan	2.038.000	3.894.500	(47,67)
Beban Langganan Listrik	48.321.734	58.733.638	(17,73)
Beban Langganan Telepon	2.944.105	3.616.519	(18,59)
Beban Langganan Air	983.662	1.627.720	(39,57)
Beban Jasa Lainnya	400.000	400.000	0,00
Jumlah	327.869.141	294.441.454	11,35

D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan:**
Rp232.518.000

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp232.518.809 dan Rp160.506.262. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.667.869	69.688.000	63,11
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	26.980.000	8.492.050	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.616.672	78.255.212	8,13
Belanja persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.254.268	4.071.000	78,19
Jumlah	232.518.809	160.506.262	44,87

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas:
Rp22.640.000**

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp22.640.000 dan Rp21.675.000. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Terjadi sedikit kenaikan di beban perjalanan dinas karena bertambahnya pagu anggaran di tahun 2017. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	22.640.000	21.675.000	4,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	22.640.000	21.675.000	4,45

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi:
Rp179.864.908**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp179.864.908 dan Rp177.037.387. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.543.700

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91.209.492	87.763.769	3,93
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.655.416	88.654.868	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	179.864.908	176.418.637	1,95
			-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	618.750	(100,00)
Jumlah Amortisasi	-	618.750	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	179.864.908	177.037.387	1,60

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.275.000		-
Pendapatan dari kegiatan non operasional	322.500	2.000	16025,00
Beban dari kegiatan non operasional	(53.800)	(7.500)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.543.700	(5.500)	(28167,27)

Pos Luar Biasa
Rp0

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pos luar biasa pada TA 2017 dan 2016

*Ekuitas Awal:
Rp5.055.519.367*

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada 1 Januari 2017 dan 2016 adalah Rp5.055.519.367 dan Rp4.984.455.954

*Defisit LO:
Rp4.250.336.033*

E.2. Surplus (Defisit)LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(4.250.336.033) dan Rp(4.563.998.632). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasioanal, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp0*

E.3. 1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp91.622.630. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi
Lain-lain:
Rp(6.747.576)*

E.3. 2. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan

2016 adalah sebesar Rp(6.747.576) dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain berupa koreksi beban jasa yang bukan merupakan beban TA 2017 akan tetapi Babab bulan Desember Tahun 2016 yang terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban Langganan Listrik	(5.425.924)
Koreksi Beban Langganan Telepon	(273.652)
Koreksi Beban Langganan Speedy	(1.048.000)
Jumlah	(6.747.576)

*Transaksi Antar
Entitas
Rp4.314.690.783*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.314.690.783 dan Rp4.543.439.415. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.361.364.189
Diterima dari Entitas Lain	(46.673.406)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.314.690.783

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar

Rp46.673.406 sedangkan DKEL sebesar Rp4.361.364.189

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Tidak terdapat Transfer Masuk maupun Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

*Ekuitas Akhir:
Rp5.113.126.541*

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.113.126.541 dan Rp5.055.519.367.

*Kejadian Penting
setelah Tanggal
Neraca*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

*Pengungkapan
Lain-Lain*

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2017 maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Terdapat Sewa Tanah yang peruntukan untuk ATM selama 5 tahun TMT 1 April 2017 sampai dengan 1 April 2022 dengan nilai Rp36.138.000 atau sama dengan Rp602.300 perbulan selama 60 bulan, dan sampai dengan 31 Desember 2017 telah berjalan selama 9 bulan yang berarti terdapat Sewa yang diterima di muka sebesar 51 bulan dikali Rp602.300 yaitu Rp30.717.300

- Terdapat belanja Langganan Air bulan Desember 2017 yang belum dibayar sebesar Rp35.770. Kemudian dicatat sebagai Beban yang masih harus dibayar.
- Terdapat belanja Langganan Listrik bulan Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian bulan Desember 2017 yang belum dibayar sebesar Rp4.483.704. Kemudian dicatat sebagai Beban yang masih harus dibayar.
- Terdapat belanja Langganan Telepon bulan Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian bulan Desember 2017 yang belum dibayar sebesar Rp86.094. Kemudian dicatat sebagai Beban yang masih harus dibayar.
- Terdapat belanja Langganan Speedy/Internet bulan Januari 2018 yang merupakan beban pemakaian bulan Desember 2017 yang belum dibayar sebesar Rp1.048.000. Kemudian dicatat sebagai Beban yang masih harus dibayar.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional

Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah:

- BRI Cabang Lubuklinggau A/C 0129-01-000455-30-8 a.n. BPG 070 PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU 01 berdasarkan izin KPPN No. S-073/WPB.07/KP.0430/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0.
- BRI Cabang Lubuklinggau A/C 0129-01-000603-30-9 a.n. BPG 070 PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU 04 berdasarkan izin KPPN No. S-072/WPB.07/KP.0430/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Peradilan Agama dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0.
- Bank Syariah Mandiri A/C 7020633322 a.n. RPL PA LLG UTK PDT BY PERKARA berdasarkan Izin Menteri Keuangan No. S-5015/MK.5/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang digunakan sebagai Penampung Menampung Biaya Perkara / Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31

Desember 2017 sebesar Rp30.697.000.

F.2.4. Revisi DIPA

Terdapat 1 Revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2017, yaitu :

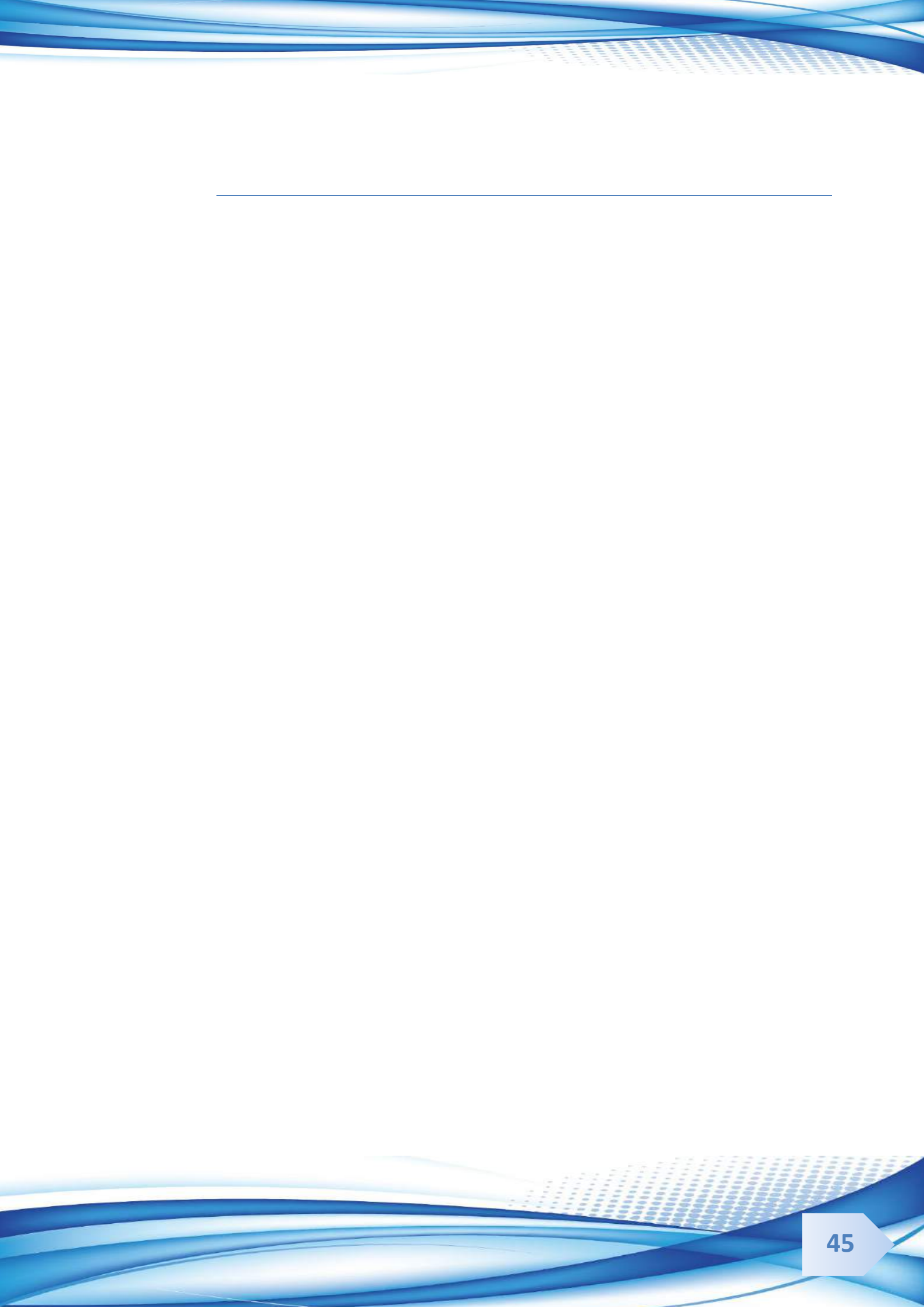
- DIPA-005.01.2.402298/2017 Revisi Ke 2 Tanggal 04 Januari 2018 yang dibukukan tanggal 29 Agustus 2017 berupa Perubahan Akun Belanja modal menjadi belanja barang sebesar Rp5.000.000 berupa Antivirus yang hanya berlisensi 12 bulan sehingga tidak memenuhi kriteria belanja modal dan juga pergeseran antar akun belanja barang yang dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan anggaran serta update rencana penarikan atau halaman 3 dipa yang berdasarkan review KPPN Lubuklinggau.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP maupun SSPB pada Tahun 2017.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

- Sebelumnya Terdapat 1 unit kendaraan dinas roda 4 merk Kijang LX milik Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dengan hak pakai guna keperluan operasional Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Berita Acara yang ditandatangani Bupati Musi Rawas dan 1 unit kendaraan dinas roda 4 merk Innova milik Pemerintahan Kota Lubuklinggau dengan hak pakai guna keperluan operasional Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Berita Acara yang ditandatangani Walikota Lubuklinggau, dan pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Lubuklinggau kembali mendapatkan Tambahan Pinjam Pakai 2 Kendaraan Dinas Roda 4 berupa Mobil Triton dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan 1 Mobil Innova dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara





LAPORAN PENDUKUNG



A. RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
	Manfaat		Per 31-12-2015	Tahun 2016	Per 31-12-2016	Per 31-12-2016
Tanah						
Tanah	-	5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
Jumlah		5.950.000.000	-	-	-	5.950.000.000
Peralatan dan Mesin						
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	240.000.000	190.714.286	34.285.714	225.000.000	15.000.000
Alat Kantor	5	900.000.000	90.000.000	180.000.000	270.000.000	630.000.000
Alat Rumah Tangga	5	500.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	350.000.000
Alat Komunikasi	5	115.000.000		23.000.000	23.000.000	92.000.000
Komputer Unit	4	100.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000
Peralatan Komputer	4	250.000.000	62.500.000	62.500.000	125.000.000	125.000.000
Peralatan Olah Raga	3	10.000.000	6.666.667	3.333.333	10.000.000	-
Jumlah		2.115.000.000	424.880.952	428.119.048	853.000.000	1.262.000.000
Gedung dan Bangunan						
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.450.000.000	1.362.500.000	109.000.000	1.471.500.000	3.978.500.000
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.000.000.000	442.250.000	40.000.000	482.250.000	1.517.750.000
Jumlah		7.450.000.000	1.804.750.000	149.000.000	1.953.750.000	5.496.250.000
Jaringan						
Jaringan Listrik	40	50.000.000	17.500.000	1.250.000	18.750.000	31.250.000
Jaringan Telepon	20	290.000.000	58.000.000	14.500.000	72.500.000	217.500.000
Jumlah		340.000.000	75.500.000	15.750.000	91.250.000	248.750.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan						
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	375.000.000	-	-	-	375.000.000
Jumlah		375.000.000				375.000.000
Aset Tetap Lainnya						
Barang bercorak kesenian	4	90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
	-		-	-	-	-
Jumlah		90.000.000	19.500.000	22.500.000	42.000.000	48.000.000
Total		16.320.000.000	2.324.630.952	615.369.048	2.940.000.000	13.380.000.000

**B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA
UANG/BARANG/JASA**

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
Daftar Hibah Langsung Berupa/Uang/Barang/Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
---NIHIL---							
Jumlah				Rp -	Rp -	Rp -	

DRAFT